

**PENDIDIKAN**

**LAPORAN PENELITIAN  
HIBAH BERSAING**



**PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN KOPERASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MELALUI  
PENINGKATAN PERAN KOMITE SEKOLAH  
DI KOTA BANDARLAMPUNG**

**Dr. Erlina Rufaidah, M. Si  
Drs. Yon Rizal, M. Si  
Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, M.Si.**

**UNIVERSITAS LAMPUNG  
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul** : PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN  
KOPERASISEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
MELALUI PENINGKATAN PERAN KOMITE  
SEKOLAH DALAM PROGRAM BINA  
LINGKUNGANDI KOTA BANDARLAMPUNG

**Peneliti/Pelaksana**  
**Nama Lengkap** : Dr. ERLINA RUFAIDAH Dra. M.Si  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Lampung  
**NIDN** : 0028065807  
**Jabatan Fungsional** : Lektor Kepala  
**Program Studi** : Pendidikan Ekonomi  
**Nomor HP** : 081293228795  
**Alamat surel (e-mail)** : atin\_lin@yahoo.com

**Anggota (1)**  
**Nama Lengkap** : Prof. Dr. Ir. WAN ABAS ZAKARIA M.S.  
**NIDN** : 0026086105  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Lampung

**Anggota (2)**  
**Nama Lengkap** : Drs. YON RIZAL M.Si.  
**NIDN** : 0018026006  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Lampung

**Institusi Mitra (jika ada)**  
**Nama Institusi Mitra** : -  
**Alamat** : -  
**Penanggung Jawab** : -  
**Tahun Pelaksanaan** : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp 50.000.000,00  
**Biaya Keseluruhan** : Rp 100.000.000,00

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kerja Sama  
FKIP Unila

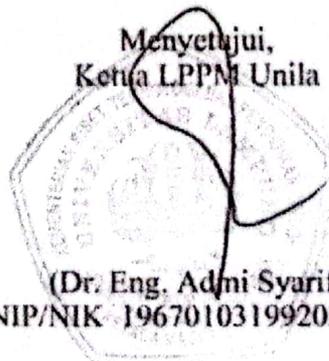


(Dr. Abdurrahman, M.Si)  
NIP/NIK 196812101993031002

Bandar Lampung, 27 - 11 - 2015  
Ketua,

(Dr. ERLINA RUFAIDAH Dra. M.Si)  
NIP/NIK 195808281986012001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Unila



(Dr. Eng. Admi Syarif)  
NIP/NIK 196701031992031003

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Urgensi dan Luaran Penelitian.....	3
<b>BAB II. STUDI PUSTAKA</b>	
2.1 Sekolah Menengah Pertama.....	5
2.2 Perekonomian Koperasi.....	7
2.3 Peran Komite Sekolah.....	8
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Aktivitas Penelitian Tahun Pertama.....	13
3.2 Aktivitas Penelitian Tahun Kedua.....	16
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	18
4.2 Pembahasan.....	20
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>29</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA`</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>31</b>

# **PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN KOPERASISEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MELALUI PENINGKATAN PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI KOTA BANDARLAMPUNG**

**Erlina Rufaidah, Yon Rizal, Wan Abbas Zakaria**

## **ABSTRAK**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk (a) mengembangkan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui optimalisasi peran komite sekolah di kota Bandarlampung; dan (b) menerapkan Model Perekonomian Koperasi yang didesain untuk meningkatkan kualitas individu dan sekolah secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang dikembangkan oleh Brog and Gall yang dilaksanakan dalam dua tahun kegiatan. *Tahun pertama*: tahap pengembangan model, berdasarkan data yang diperoleh pada seminar model awal, merancang model awal, melakukan studi banding, merevisi, dan menghasilkan model perekonomian koperasi sekolah melalui peningkatan peran komite sekolah. *Tahun kedua*: mensosialisasikan model perekonomian koperasi sekolah, melakukan uji coba model, memvalidasi dan merevisi model, mengimplementasikan model. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terbentuknya model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama di kota metro. Dengan hasil ini kiranya dapat menjadi benchmark untuk sekolah lain dalam membentuk mode koperasi.

**Kata Kunci;** Perekonomian Koperasi, Peran Komite Sekolah, Program Bina Lingkungan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Didalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002, menjelaskan bahwa Komite Sekolah merupakan badan independen yang mengakomodir peran serta masyarakat dalam meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah diantaranya adalah membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya (Depdiknas, 2001:17).

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut: (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (7)

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Ninik, 2011)

Peran komite sekolah yang sangat vital dalam pengembangan kualitas pendidikan menuntut sumbangsih komite sekolah sebagai penasehat, pendukung, pengontrol, dan mediator untuk penggalangan dana. Peran tersebut perlu didukung dengan keikutsertaan komite sekolah dalam mengembangkan aktivitas dan produktivitas perekonomian koperasi, artinya komite sekolah sebagai penggerak ekonomi, dan pelopor dunia wirausaha dalam rangka kemajuan siswa/i dalam proses pembelajaran.

Pemberdayaan dan peningkatan fungsi komite sekolah, dapat dilakukan dengan cara membina kerja sama dengan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah diharapkan dapat melahirkan tanggung jawab bersama antara masyarakat (wali murid) dan sekolah sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Peran komite sekolah sebagai mediator untuk melatih keterampilan dan kewirausahaan siswa dapat diwujudkan dengan membentuk koperasi sebagai salah satu wadah untuk melatih siswa berwirausaha. Disamping itu pula, dampak positif dari pembentukan koperasi yang diinisiasi oleh komite sekolah ini dapat membantu wali murid yang memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan. Nantinya, pendapatan dari koperasi yang dibentuk tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti buku, seragam dan penunjang lainnya dalam proses pembelajaran.

## **1.2. Tujuan Khusus**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama melalui peningkatan peran komite sekolah dalam program bina lingkungan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membentuk perekonomian koperasi sekolah menengah pertama, yang mencakup: menyediakan buku media belajar, mendukung, mengontrol, dan mengevaluasi. Kondisi akan dijadikan bahan untuk mengembangkan Model Perekonomian Koperasi

Sekolah Menengah Pertama melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandarlampung.

- b. Mengimplementasikan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandarlampung, yang akan berdampak pada kualitas siswa/i dan sekolah secara keseluruhan.

### **1.3. Urgensi dan Luaran Penelitian**

Secara khusus untuk komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan MBS. Dalam MBS, sekolah mempunyai wewenang untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan ini dijalankan dengan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Artinya dalam pengelolaan sekolah, dewan pendidik, khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah komite sekolah.

Dapat dilaksanakannya peran dan fungsi komite sekolah, maka akan menempatkan komite sekolah pada posisi yang sangat strategis untuk mamajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui komite sekolah ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat (wali murid) itu sendiri. Artinya dengan mengoptimalkan peran komite sekolah maka akan meberikan jaminan pelibatan masyarakat (wali murid)dalam mendukung proses pendidikan.

Dilaksanakannya peran dan fungsi komite sekolah sebagai pelaku ekonomi dalam peningkatan mutu pendidikan, maka hal itu dapat dikatakan terselenggaranya model perekonomian koperasi sekolah. Komite sekolah sebagai salah satu komponen saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab dan aturan yang berlaku. Hal ini yang dikatakan tata kelola yang baik dan bersih dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik disekolah.

Pada dasarnya, penyelenggaraan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip kemandirian merupakan tujuan bagi setiap sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena dengan terciptanya kemandirian sekolah maka semua

komponen pendidikan akan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan bersih secara profesional dan proposional.

Kondisi yang diharapkan ini, tidak semua terlaksana. Karena ada banyak variabel yang memberikan kontribusi untuk mencapai kemandirian sekolah,, diantaranya adalah semua komponen pendidikan di sekolah harus memahami tugas dan fungsinya masing-masing, kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, manajemen sekolah, dan dukungan nyata dari masyarakat.

## **BAB II. STUDI PUSTAKA**

### **2.1 Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 17 ayat (1) pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; (2) pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (mts), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) atau yang sederajat. Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Siswa kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang mempengaruhi kelulusan atau tidaknya siswa. Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi, yaitu pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau yang sederajat. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk wajib belajar bagi setiap warga negara berusia 7-15 tahun di Indonesia. Wajib belajar 9 tahun meliputi pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini pernah disebut sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim (2006) mengidentifikasi ciri-ciri sekolah bermutu, yaitu:

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya.
4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya.
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
8. Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horozontal.
10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan.

## **2.2 Perekonomian Koperasi**

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan "urusniaga" secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18).

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk "Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945".

Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **2.2.1 Fungsi Koperasi Sekolah**

1. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah.
2. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa.
3. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi, agar kelak berguna di masyarakat.
5. Membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan luar sekolah.

### **2.2.2 Tujuan Koperasi Sekolah**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dengan berprinsip ekonomi, fungsi sosial dengan akan terjadi proses tolong menolong dan gotong royong antar sesama anggota koperasi. Melalui pembelajaran koperasi di sekolah siswa akan terbentuk pola sikap dan karakter untuk selalu menggunakan koperasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial

Sedangkan pembentukan Koperasi Sekolah dikalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan koperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini.

### **2.3 Peran Komite Sekolah**

Keberadaan komite sekolah secara legal formal dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Berdasarkan Mendiknas tersebut, komite sekolah bertujuan untuk (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi

dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Menciptakan suasana kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dengan demikian, maka komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Lebih lanjut dalam Keputusan Mendiknas tersebut dijelaskan bahwa, keberadaan komite sekolah berperan sebagai (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud *financial*, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan (4) *Mediator* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Terkait dengan keempat peran komite sekolah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Peran memberi pertimbangan, dilakukan komite sekolah pada aspek perencanaan sekolah Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumberdaya pendidikan.
- (2) Peran memberi dukungan, dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran.
- (3) Peran mengontrol, dilaksanakan dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau *output* (keluaran) pendidikan.
- (4) Peran penghubungan, menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, dinas pendidikan, dan dunia usaha dalam hal perencanaan, pelaksanaan, program, dan pengelolaan sumberdaya.

Mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi komite sekolah tersebut maka dalam pembentukan organisasi komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. *Transparan* artinya komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara *akuntabel* maksudnya panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara *demokratis* artinya dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota komite dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Komite sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memegang prinsip partisipasi dalam kegotong-royongan, transparansi yang artinya memberikan kejelasan terhadap program yang dijalankan, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari prinsip perekonomian koperasi yang mengedepankan pada prinsip kegotong-royongan yang dalam proses pelaksanaannya merupakan bertolak pada prinsip kemandirian, keluwesan, dan fleksibilitas melalui komunitas pendidikan di sekolah.

Berdasarkan pemahaman di atas maka peran komite sekolah dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.  
Indikator Kegiatan Operasional Komite Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen Pendidikan
1	Badan Pertimbangan ( <i>Advisory Agency</i> )	1. Perencanaan Sekolah (RKS, RKT, dan RKAS) 2. Pelaksanaan Program: a. Kurikulum b. PBM c. Penilaian

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengelolaan sumberdaya Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM</li> <li>b. Sarana dan Prasarana</li> <li>c. Anggaran</li> </ul> </li> </ul>
2	Badan Pendukung ( <i>Supporting Agency</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sumber daya</li> <li>2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</li> <li>3. Pengelolaan Anggaran</li> </ul>
3	Badan Pengontrol ( <i>Controlling Agency</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah</li> <li>2. Memantau pelaksanaan program sekolah</li> <li>3. Memantau output pendidikan</li> </ul>
4	Badan Penghubungan ( <i>Mediator Agency</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pelaksanaan program</li> <li>3. Pengelolaan sumber daya pendidikan</li> </ul>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.

Menurut Sujadi (2003:164), Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development* (R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (*hardware*), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (*software*), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (2011:407) metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.

#### Langkah-langkah Penelitian Pengembangan

Menurut Sugiyono (2011:408) langkah-langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk yang dimaksud, adalah :

1. Potensi dan masalah
2. Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur
3. Desain Produk
4. Validasi Desain
5. Perbaikan Desain
6. Uji coba Produk

7. Revisi Produk
8. Ujicoba Pemakaian
9. Revisi Produk
10. Pembuatan Produk Masal

Berdasarkan tahapan di atas, penelitian ini terdiri atas dua tahap yang dirangkai dalam dua tahun untuk anggaran 2014 dan 2015. Penelitian tahun pertama merupakan penelitian lapangan yang akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan menelusuri pelaksanaan peran komite sekolah dalam penerapan ekonomi koperasi SMP. Adapun susunan rancangan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **3.1 Aktivitas Penelitian Tahun Pertama**

#### **1. Penentuan lokasi penelitian**

Tahap pertama yang dilakukan pada penelitian tahun pertama adalah menentukan lokasi penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian harus memiliki karakteristik sekolah yang diinginkan, yaitu Sekolah Menengah Pertama yang memiliki komitmen untuk menerapkan sistem perekonomian koperasi di sekolahnya. Pemilihan lokasi tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Bandar Lampung.

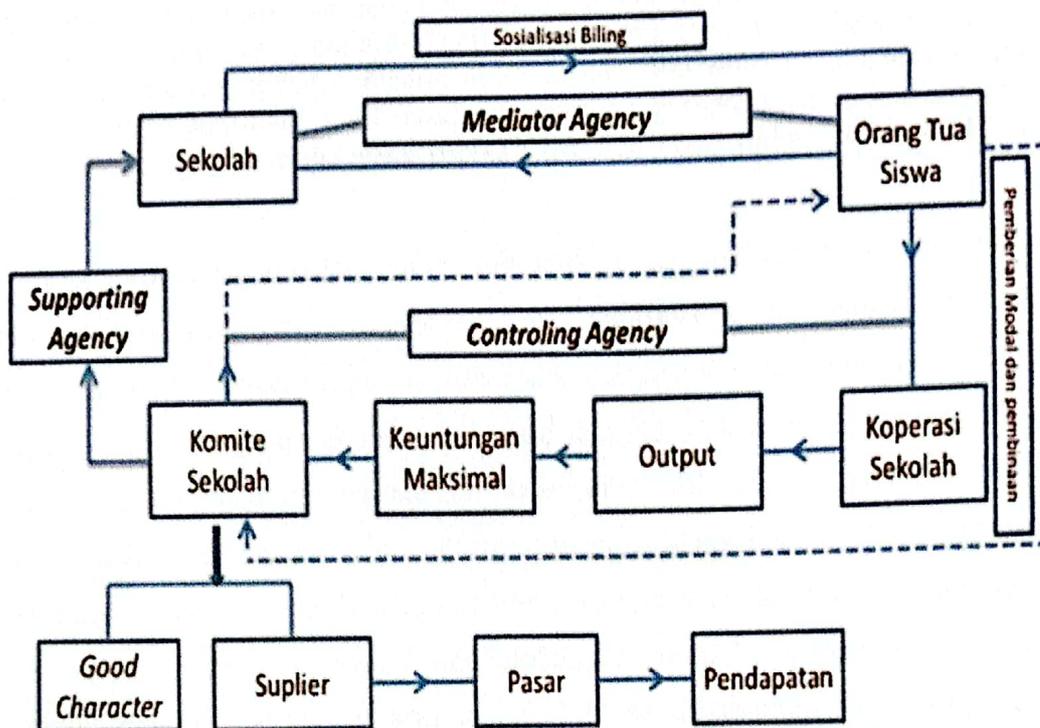
#### **2. Pengumpulan Data**

Pada tahap kedua yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian dari sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada awal penelitian sampai pada tahap penyusunan laporan penelitian.

#### **3. Rancangan model**

Setelah mendapatkan masukan berbagai pihak, maka akan dirumuskan rancangan model perekonomian koperasi di sekolah melalui peran komite sekolah. Pada tahap ini merupakan rancangan awal yang masih diperlukan

verifikasi lebih lanjut. Adapun gambaran dari model tersebut adalah sebagai berikut.



**Gambar 1. Kerangka Pikir Pengembangan Model Perekonomian Koperasi Sekolah SMP melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah**

Berdasarkan gambar di atas mengenai Pengembangan model perekonomian koperasi melalui peningkatan peran komite bermula dari komite sekolah yang merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Komite sekolah melalui perannya sebagai Badan Pendukung atau *Supporting Agency* dilaksanakan dalam pengelola sumberdaya, pengelola sarana dan prasarana, dan pengelola anggaran, yang kemudian dilanjutkan dari sekolah kepada orang tua siswa.

Peran komite sekolah yang berfungsi yaitu Badan Perhubungan atau *Mediator Agency* dimana komite sekolah menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, dinas pendidikan, dan dunia usaha dalam hal ini perencanaan, pelaksanaan, program, dan pengelola sumberdaya. Selanjutnya dari orang tua siswa diberikan pembinaan, pembekalan, dan pelatihan serta memberikan modal untuk

mempersiapkan dan menghasilkan jiwa *enterprenuer* yang kemudian dikemas dan diberikan suatu wadah dari komite sekolah berupaperencanaan pembentukan koperasi sekolah.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Dari koperasi sekolah yang dibentuk akan menghasilkan output yang mendapatkan keuntungan maksimal yang nantinya akan kembali lagi kepada orang tua siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan anaknya agar dapat terpenuhi seperti buku, seragam sekolah, dan yang lainnya. Pelaksanaan koperasi sekolah yang dibentuk oleh komite sekolah akan dikontrol sebagaimana peran komite yaitu Badan Pengontrol (*Controlling Agency*), dilaksanakan dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau *output*. Sehingga pengembangan model perekonomian koperasi melalui peningkatan peran komite sekolah ini diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang memiliki *Good Character* dan untuk koperasi sekolah yang telah dibentuk menjadi supplier yang diminta pasar kemudian menghasilkan pendapatan.

#### 4. Studi Banding

Untuk memverifikasi hasil rancangan awal, maka peneliti bersama timpeneliti lainnya melakukan studi banding ke berbagai sekolah di daerah lain. Penentuan lokasi banding ini, dinilai bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan penerapan perekonomian koperasi di sekolah.

#### 5. Revisi Rancangan Model

Setelah melalui tahap sebelumnya, dokumen rancangan model awal yang telah dirumuskan sebelumnya dinilai cukup alasan untuk direvisi sehingga akan layak untuk diimplementasikan.

## 6. Produk Tahun Pertama

Produk tahun pertama adalah dokumen model perekonomian koperasi SMP melalui peningkatan peran komite sekolah dalam program bina lingkungan. Model ini diujicobakan di sekolah lain dengan karakteristik sekolah yang sama dan berbeda pada tahun kedua kegiatan penelitian.

### 3.2 Aktivitas Penelitian Tahun Kedua

Subjudul dua : Implementasi Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan peran komite sekolah dalam program bina lingkungan.

Tujuan : Untuk Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan Peran Komite Sekolah dalam Program Bina Lingkungan

Adapun aktivitas tersebut mencakup:

#### 1. Seminar dan Sosialisasi model

Kegiatan ini diikuti oleh para praktisi pendidikan terutama para kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama melalui peningkatan peran komite sekolah yang telah disusun pada kegiatan penelitian tahun pertama.

#### 2. Uji Coba Model

Pada tahap ini akan diujicobakan pada sekolah yang telah ditentukan sebagai langkah awal implementasi model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama melalui peningkatan peran komite sekolah. Hasil uji coba selanjutnya akan dilakukan revisi oleh ahli melalui *Forum Group Discussion* (FGD).

3. **Validasi dan Revisi Model**  
Validasi dan revisi model, merupakan tahap dalam pemodelan untuk menentukan tingkat kesesuaian model dengan sistem nyata yang direpresentasikan. Terdapat empat tahap dalam proses validasi model, yaitu: (1) Validasi konseptual, (2) validasi logikal, (3) validasi eksperimental, dan (4) validasi operasional (Landry et al., 1983).
4. **Implementasi Model**  
Langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi model yang telah direvisi pada sekolah yang telah ditentukan sebagai lokasi penelitian lainnya yaitu di daerah yang berada perkotaan (urban), yakni Kota Bandar Lampung dan di daerah pedesaan (sub urban), yakni Kabupaten Way Kanan.
5. **Pengolahan Data Hasil Implementasi Model**  
Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui hasil implementasi model di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang merujuk pada data historis, dilanjutkan dengan uji verifikasi dan validasi.
6. **Laporan Hasil Penelitian dan Publikasi**  
Hasil pengolahan data dijadikan dasar untuk penyusunan laporan penelitian, selanjutnya diseminarkan dan dipublikasikan dalam terbitan jurnal penelitian.
7. **Selesai seluruh aktivitas penelitian**

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada tahun pertama yaitu (a) identifikasi keberadaan koperasi di seluruh sekolah menengah pertama yang terdapat di kota Bandar Lampung (b) wawancara kepada perangkat sekolah terhadap upaya pengembangan koperasi sekolah berikut dengan keterlibatan komite sekolah. Perlunya melakukan identifikasi koperasi sekolah adalah untuk mengklasifikasikan sekolah dengan koperasi sekolah yang mapan, berkembang, dan belum terbentuk. Selanjutnya dari data yang diperoleh akan diterapkan langkah-langkah strategis yang berbeda untuk menyelesaikan masalah pengembangan koperasi sekolah melalui optimalisasi peran komite sekolah. Adapun sebaran sekolah yang sudah memiliki koperasi dan yang belum memiliki koperasi disajikan pada data tabel 4.1

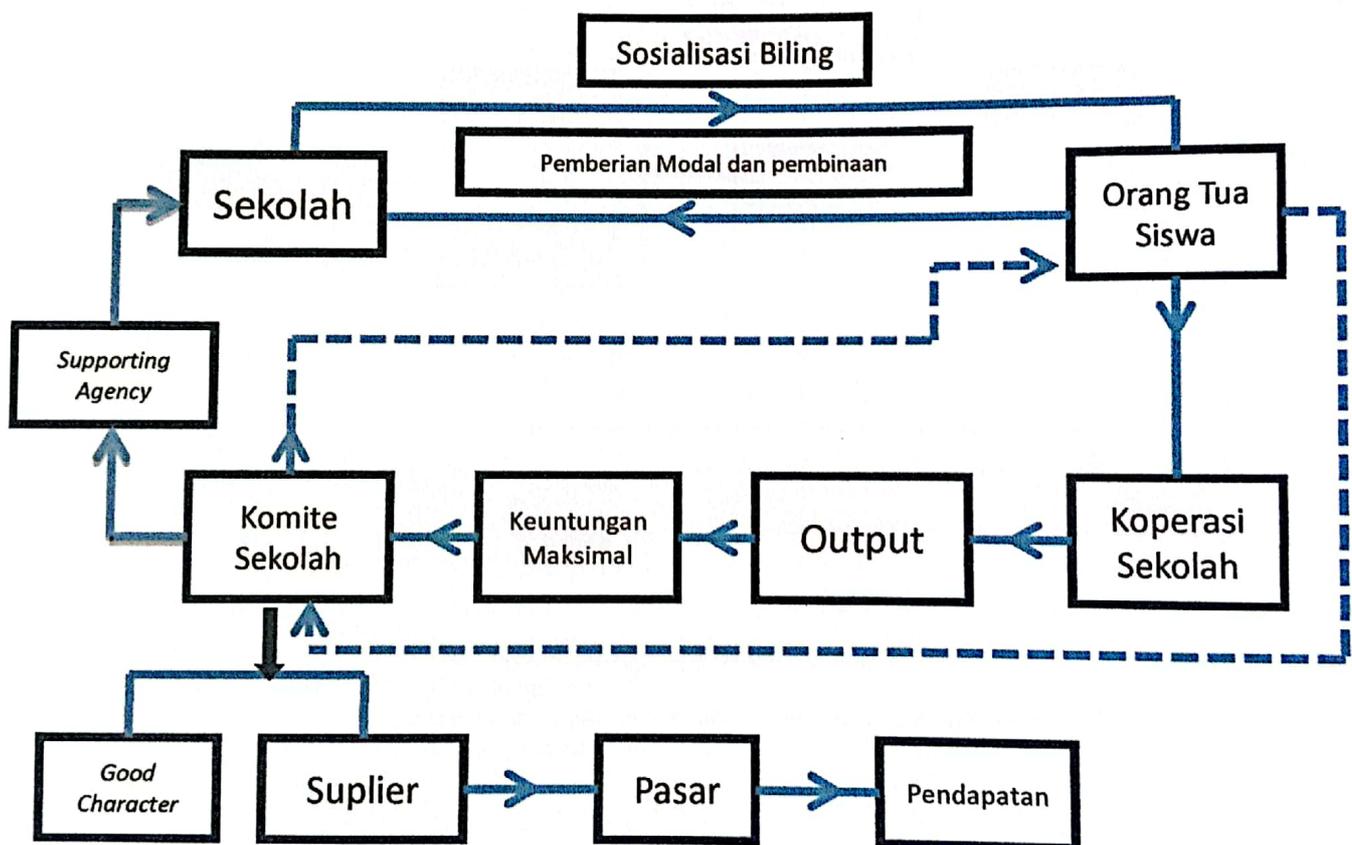
#### Daftar Nama SMP di Bandar Lampung Yang memiliki Koperasi dan Tidak

No.	Nama	Alamat	Status	Koperasi	
				Ya	Tidak
1	MTSN 1 TANJUNG KARANG	Jl. Way kanan no. 42	Negeri	Ya	
2	MTSN 2 TANJUNG KARANG	Jl. Pulau pisang no. 20	Negeri		Tidak
3	SMPN 1 BANDAR LAMPUNG	Jl. mr. gele harun no.30	Negeri	Ya	
4	SMPN 2 BANDAR LAMPUNG	Jl. Jend. Sudirman rawa laut	Negeri	Ya	
5	SMPN 3 BANDAR LAMPUNG	Jl. Basuki rahmat gedong pakuon	Negeri	Ya	
6	SMPN 4 BANDAR LAMPUNG	Jl. Hos. Cokroaminoto no. 93	Negeri	Ya	
7	SMPN 05 BANDAR LAMPUNG	Jl. Beo no. 134 tanjung agung	Negeri	Ya	
8	SMPN 06 BANDAR LAMPUNG	Jl. Laksamana malahayati	Negeri	Ya	
9	SMPN 07 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sultan badaruddin n0.4 sg. Mider	Negeri	Ya	
10	SMPN 08 BANDAR LAMPUNG	Jl. Untung suropati gg. Bumi manti 2	Negeri	Ya	
11	SMPN 09 BANDAR LAMPUNG	Jl. Amir hamzah no. 9 gotongroyong	Negeri	Ya	
12	SMPN 10 BANDAR LAMPUNG	Jl. Panglima polim no. 5	Negeri	Ya	
13	SMPN 11 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sentot ketapang	Negeri	Ya	

14	SMPN 12 BANDAR LAMPUNG	Jl. P. Morotai	Negeri	Ya
15	SMPN 13 BANDAR LAMPUNG	Jl. Marga beringin raya	Negeri	Ya
16	SMPN 14 BANDAR LAMPUNG	Jl. Teuku cik ditiro langkapura	Negeri	Ya
17	SMPN 15 BANDAR LAMPUNG	Jl. Banten no. 18 kuripan	Negeri	Ya
18	SMPN 16 BANDAR LAMPUNG	Jl. Dr. Cipto mangunkusumo no. 42	Negeri	Tidak
19	SMPN 17 BANDAR LAMPUNG	Jl. Abdi negara no. 9	Negeri	Ya
20	SMPN 18 BANDAR LAMPUNG	Jl. Rasuna said no. 29 sumur batu	Negeri	Ya
21	SMPN 19 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sukarno hatta gg. Turi no. 1	Negeri	Ya
22	SMPN 20 BANDAR LAMPUNG	Jl. Ra. Basit labuhan dalam	Negeri	Ya
23	SMPN 21 BANDAR LAMPUNG	Perum korpri bnlok d8	Negeri	Ya
24	SMPN 22 BANDAR LAMPUNG	Jl. Pagar alam gedong meneng	Negeri	Tidak
25	SMPN 23 BANDAR LAMPUNG	Jl. Jend. Sudirman no. 76 rawa laut	Negeri	Ya
26	SMPN 24 BANDAR LAMPUNG	Jl. Letkol hi. Indro suratman	Negeri	Ya
27	SMPN 25 BANDAR LAMPUNG	Jl. Amir hamzah no. 58 gotongroyong	Negeri	Ya
28	SMPN 26 BANDAR LAMPUNG	Jl. Imam bonjol kurungan nyawa	Negeri	Ya
29	SMPN 27 BANDAR LAMPUNG	Lempasing	Negeri	Ya
30	SMPN 28 BANDAR LAMPUNG	Perumnas bukit kemiling	Negeri	Ya
31	SMPN 29 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sukarno hatta	Negeri	Tidak
32	SMPN 30 BANDAR LAMPUNG	Serengsem	Negeri	Tidak
33	SMPN 31 BANDAR LAMPUNG	Jl. Riyakudu campang raya tanj. Krg timur	Negeri	Ya
34	SMPN TERBUKA 11 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sentot, ketapang telukbetung selatan	Negeri	Ya
35	SMPN TERBUKA 15 BANDAR LAMPUNG	Jl. Banten no.18 telukbetung barat	Negeri	Ya
36	SMPN TERBUKA 20 BANDAR LAMPUNG	Jl. R.a Basyid	Negeri	Ya

## 4.2 Pembahasan

Hasil analisis terhadap 36 sekolah menengah pertama yang terdapat di kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa terdapat 5 sekolah (13,88%) yang belum memiliki koperasi sedangkan sisanya (31 sekolah atau 86,11%) sudah memiliki koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMP di kota Bandar Lampung sudah memperhatikan pentingnya keberadaan koperasi di sekolah. Pengembangan model perekonomian koperasisekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui peningkatan peran komite sekolah ini dengan model sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 4.1

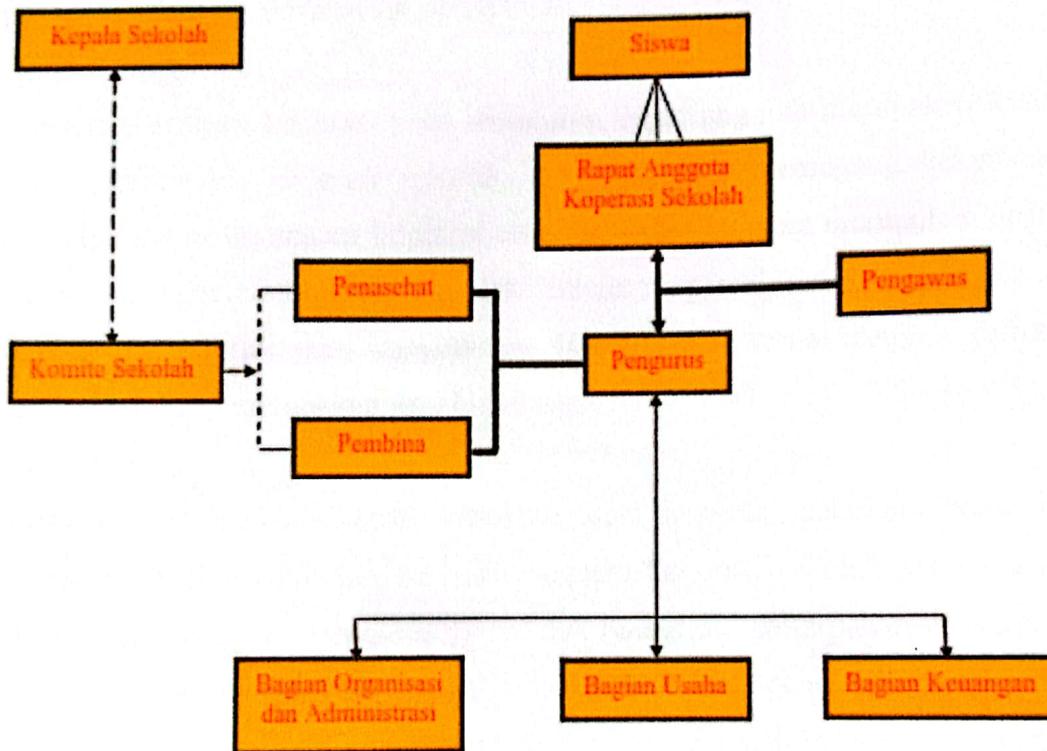


Gambar.4.1 Model Prototipe Pengembangan Koperasi Sekolah

Koperasi saat ini masih perlu dikembangkan agar dapat bersaing dengan perkembangan usaha swasta lainnya dan ini merupakan pendidikan kewirausahaan yang ideal di sekolah. Masalah-masalah yang dihadapi koperasi terutama aspek keseimbangan, aspek usaha dan modal, modal kerja bagi koperasi sangat penting perlu mendapat perhatian penting dari seluruh *stakeholders*. Kendala klasiknya adalah pada ketersediaan modal. Namun demikian, modal tersebut harus

disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dan operasional koperasi apabila terjadi kekurangan modal kerja akan mengakibatkan koperasi tersebut mengalami stagnansi perkembangan, masalah modal ini sangat penting bagi koperasi karena dari itu koperasi sekolah harus cermat dalam mengelola modal.

#### A. STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KOMITE SEKOLAH



Keterangan :

- = Garis tugas dan tanggung jawab setiap bagian
- = Garis fungsional
- = Garis tugas dan tanggung jawab para komite sekolah dan guru terhadap kepala sekolah

Keterangan :

- = Garis tugas dan tanggung jawab setiap bagian
- = Garis fungsional
- = Garis tugas dan tanggung jawab para komite sekolah dan guru terhadap kepala sekolah

## **A. Tugas Organisasi Koperasi Sekolah**

Seperti halnya badan usaha lain, manajemen koperasi sekolah sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Usaha-usaha tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara umum, perangkat organisasi koperasi sekolah tidak berbeda dengan perangkat organisasi koperasi lainnya, walaupun strukturnya lebih sederhana. Kegiatan manajemen koperasi sekolah dicapai dengan menggunakan seperangkat organisasi yang meliputi rapat anggota, pengurus dan manajer, serta badan pemeriksa.

### **1) Rapat Anggota**

Seperti organisasi koperasi pada umumnya, rapat anggota merupakan kunci dari keberhasilan koperasi sekolah. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi sekolah. Rapat anggota merupakan unsur dalam manajemen koperasi sekolah karena koperasi sekolah merupakan badan usaha milik para anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi yang merupakan asas koperasi.

### **2) Pengurus**

Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi sekolah. Pengurus koperasi sekolah adalah siswa-siswi anggota koperasi sekolah yang dipilih dalam rapat anggota. Pengurus yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota itu mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi sekolah. Oleh karena itu, pengurus harus mampu menjabarkan kebijakan dan keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih terinci disertai dengan rencana/langkah-langkah operasionalnya.

### **3) Badan Pengawas/Pemeriksa**

Badan pengawas atau pemeriksa tugasnya melakukan pengawasan, apakah pengurus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawas koperasi sekolah dapat dipilih dari siswa yang menjadi anggota atau para guru yang sudah mendapat persetujuan kepala sekolah. Jumlah pengawas adalah tiga orang dengan masa jabatan satu tahun.

Selain ketiga unsur pokok tersebut, dalam manajemen koperasi biasanya juga terdapat unsur penunjang berupa badan penasihat, pembina, dan pelindung. Badan penasihat, pembina, dan pelindung biasanya berada di bawah kepala sekolah atau pejabat perwakilan dari direktorat jenderal koperasi setempat. Badan penasihat, pembina, dan pelindung yang beranggotakan guru-guru, diperlukan untuk menunjang jalannya kepengurusan koperasi sekolah. Anggota badan penasihat dan pembina adalah para guru atau wakil yang ditunjuk dari pengurus dewan atau komite sekolah atau bisa juga perwakilan orangtua siswa yang tergabung dalam BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).

## **B. Modal Koperasi Sekolah**

Seperti kegiatan koperasi lainnya, modal koperasi sekolah diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman.

### **1) Modal Sendiri**

- a. Simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok ditentukan dalam anggaran rumah tangga koperasi sekolah.
- b. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayarkan secara kontinu pada waktu tertentu. Misalnya, setiap bulan atau tiga bulan. Pembayaran simpanan wajib digabungkan dengan pembayaran administrasi Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). Besarnya simpanan wajib ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi sekolah.
- c. Penyisihan atau cadangan Sisa Hasil Usaha (SHU).
- d. Sumber-sumber lainnya, misalnya sumbangan dari orangtua serta bantuan dari para guru dan kepala sekolah atau dari dana BP3.

### **2) Modal Pinjaman**

Modal pinjaman berasal dari sumber-sumber, antara lain:

- a. pinjaman dari pihak lain, misalnya dari koperasi lain;
- b. pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya;
- c. Bantuan pemerintah

### **C. Bidang usaha koperasi sekolah**

Usaha atau unit usaha koperasi sekolah harus berorientasi pada kepentingan siswa di sekolah yang bersangkutan. Bidang usaha yang biasa terdapat dalam koperasi sekolah, antara lain sebagai berikut.

#### **1. Unit Usaha Simpan Pinjam**

Bidang usaha simpan pinjam diselenggarakan koperasi sekolah dengan tujuan membantu para anggota dalam mengatasi masalah keuangan dan mendidik siswa untuk belajar hidup hemat.

#### **2. Unit Usaha Toko**

Bidang usaha toko menjual berbagai keperluan siswa, seperti alat tulis, buku pelajaran, makanan, dan atribut sekolah. Bimbingan dan pengawasan guru sangat dibutuhkan untuk kelangsungan unit usaha tersebut. Pengelolaan koperasi sekolah biasanya dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal piket para siswa.

#### **3. Unit Kafetaria/Kantin Sekolah**

Usaha kafetaria biasanya dilakukan sendiri oleh anggota koperasi, para guru, atau dengan menjalin kerja sama dengan para produsen makanan atau minuman ringan.

#### **4. Unit Usaha Pelayanan/Jasa**

Selain memberikan dan menyediakan kebutuhan berupa barang. Unit usaha koperasi juga menyediakan pelayanan/jasa-jasa. Pelayanan tersebut antara lain dalam bentuk jasa fotokopi, wartel, dan kursus-kursus.

### **D. Sisa Hasil Usaha**

SHU Koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue ) atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dengan lambang (TC) dalam satu tahun waktu. Lebih lanjut pembahasan mengenai pengertian koperasi bila ditinjau menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
4. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
5. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
6. Semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Dalam proses penghitungannya, nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:

1. SHU total koperasi pada satu tahun buku
2. Bagian (persentase) SHU anggota
3. Total simpanan seluruh anggota
4. Total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5. Jumlah simpanan per anggota
6. Omzet atau volume usaha per anggota
7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

## **Rumus Pembagian SHU**

Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 :

1. Mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.
2. Didalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.
3. Tidak semua komponen diatas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Perumusan :

**SHU = JUA + JMA, dimana**

**SHU =  $V_a/V_{uk} \cdot JUA + S_a/T_{ms} \cdot JMA$**

Dengan keterangan sebagai berikut :

SHU : sisa hasil usaha

JUA : jasa usaha anggota

JMA : jasa modal sendiri

Tms : total modal sendiri

Va : volume anggota

Vak : volume usaha total kepuasan

Sa : jumlah simpanan anggota

Masalah koperasi sekolah yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan perkembangannya menyebabkan koperasi sebagai badan usaha yang berada di selokah harus memiliki budaya korporasi yang kondusif sehingga dapat

mengatualisasikan dirinyaditengah realitas liberalisasi perekonomian yang terus bergeraksehingga koperasi sekolah akan mempunyai daya tarik sebagai sarana penghimpun pontensi ekonomi para anggotanya yang kecil-kecil dan tersebar di lingkup sekolah karena koperasi lebih di promosikan sebagai badan usaha yang ideal (tidak mencari keuntungan dan berwatak sosial).

Perkembangan teknologi yang bisa mengembangkan koperasi sekolah tersebut perlu diadopsi dalam mendata semua unit barang dan harga barang ke dalam komputer agar sewaktu-waktu dapat diperiksa apabila ada kesalahan dalam pencatatan unit barang yang telah dikeluarkan. Siswa juga dapat menyebabkan kendala tersebut datang, karena kalau kita mengikutsertakan siswa sebagai anggota atau nasabah dalam koperasi yang ada disekolah ini mungkin akan lebih baik berkembangnya koperasi ini dan akan lebih maju, karena jumlah siswa lebih banyak dibandingkan jumlah karyawan atau guru-guru di sekolah tersebut.

Pemerintah perlu mengembangkan koperasi sehingga hal tersebut akan menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia untuk maju. Koperasi sebenarnya telah dibantu oleh pemerintah lewat dana-dana segar, namun pengawasan terhadap bantuan tersebut perlu ditingkatkan. Karena sifat bantuannya yang tidak wajib dikembalikan, hal ini dapat menjadi hal yang tidak mendidik.Akibatnya, koperasi akan menjadi tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara.

Perkembangan koperasi di Indonesia yang dilakukan dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down),artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Koperasi seyogyanya terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung yang konstruktif saja. Di Indonesia, pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.

Koperasi sekolah sebagai wadah pendidikan perkoperasian dan sekaligus sebagai kegiatan ekonomi dari, oleh, dan untuk siswa, maka keberadaannya perlu dikembangkan. Untuk itu perluperanan dari beberapa pihak seperti kepala sekolah, komite sekolah orang tua atau masyarakat perlu diwadahi. Kepala sekolah dapat berperan dalam menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi sekolah, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi sekolah, serta bertanggung jawab atas kelancaran jalannya koperasi sekolah.

Pada level pemerintah, upaya pembinaan koperasi sekolah, dapat dilakukan dengan menetapkan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pemberian fasilitas terhadap koperasi sekolah, memberikan kemudahan dalam pengadaan alat-alat sekolah dan fasilitas lainnya, serta memberikan kemudahan dan membantu dalam masalah permodalan. Seorang guru pun dapat berperan dalam pengembangan koperasi sekolah seperti mengarahkan kegiatan koperasi sekolah sesuai dengan tujuannya, memberikan langkah-langkah praktis dalam menjalankan koperasi sekolah, memberikan saran-saran praktis, nasihat, dan bantuan konsultasi atas masalah-masalah yang dihadapi koperasi sekolah, serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi sekolah.

Beberapa hal dapat dilakukan untuk mengembangkan koperasi sekolah. Dari sisi kelembagaan, diperluka adanya inventarisasi dan identifikasi (mapping) terhadap koperasi sekolah yang ada untuk menetapkan program kebijaksanaan teknis selanjutnya. Dalam konteks otonomi daerah, pejabat terkait perlu memberikan kewenangan yang proporsional dalam menetapkan koperasi sekolah sebagai sebuah badan hukum dalam satu atap sesuai dengan kompetensi masing-masing (sesuai wilayah kerjanya). Dari sisi produktivitas dan efisiensi, upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi koperasi sekolah perlu bekerjasama dengan koperasi lain pada sektor-sektor produksi dan distribusi. Jika kondisi normal, maka koperasi sekolah dapat diberikan peran lebih besar pada sektor jasa dan perdagangan sesuai dengan mekanisme pasar. Untuk meningkatkan peranan tersebut, pemerintah maupun dunia usaha dapat memberikan fasilitas baik dalam pengembangan, sarana/ prasarana dan kemitraan kepada koperasi sekolah.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam mengembangkan koperasi sekolah, perlu dibangun sebuah sistem atau model pengembangan koperasi sekolah yang holistik dengan sistem pengawasannya yang sistematis dan membuka diri terhadap keterlibatan berbagai pihak. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing. Koperasi sekolah dapat lebih berkembang dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Koperasi sekolah perlu lebih berinisiatif dan kreatif untuk memajukan koperasi Indonesia khususnya dalam lingkup sekolah. Sekolah, pemerintah, bersama dengan komite sekolah dan para pemangku kepentingan dapat lebih berinisiatif dan mendukung koperasi sekolah untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan koperasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Anonim, Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pendoman Teknis Kepala Sekolah, Penguatan Komite Sekolah/Madrasah untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik*. Jakarta: Kemendiknas dan Kemenag, 2009.
- Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, Revrison, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Erani Yustika. Ahmad, *Ekonomi Kelembagaan*, 2006, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kuncoro. Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, 2003, Kaliurang: Erlangga.
- Lipsey. Richard G, *Pengantar Makro Ekonomi*, 1995, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Samuelson. Paul, *Makroekonomi*, 1992, Jakarta : Erlangga.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Justifikasi Anggaran

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rupiah)		
		Tahun I	Tahun II	Tahun III
1	Gaji dan Upah	19.000.000	19.000.000	19.000.000
2	Bahan Habis Pakai dan Peralatan	24.050.000	37.305.000	34.050.000
3	Perjalanan	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4	Lain-lain: - Publikasi Internasional - Pembuatan dan Penggandaan Laporan - Dokumentasi - Validasi dan Revisi Temuan	3.950.000	5.695.000	3.950.000
5	Total Anggaran	55.000.000	70.000.000	75.000.000
<b>Total Keseluruhan Anggaran</b>		<b>200.000.000 (dua ratus juta rupiah)</b>		

## Lampiran 1a. Justifikasi Anggaran Tahun Pertama

### 1.1. Anggaran Pelaksana Tahun I

#### a. Ketua Peneliti (12 jam/minggu) x 10 bulan

1 x 10 bulan x Rp 500.000 = Rp 5.000.000

#### b. Anggota Peneliti (10 jam/minggu) x 10 bulan

2 x 10 bulan x Rp 400.000 = Rp 8.000.000

#### c. Pembantu Peneliti/Tenaga administrasi (5 jam/minggu)

2 x 10 bulan x Rp 300.000 = Rp 6.000.000

**Total Anggaran Gaji dan Upah** **Rp 19.000.000**

### 1.2. Anggaran Komponen/Alat

#### a. Pengembangan Instrumen Penelitian berfungsi sebagai pengumpul data dan untuk revisi model (angket, kuisioner, pretes-postes, lembar observasi aktivitas, pedoman wawancara)

1 Unit x Rp 8.000.000 = Rp 8.000.000

#### b. Pengembangan dan penggandaan bahan ajar dan panduan penerapan model

100 Unit x Rp 65.100 Rp 6.510.000

**Total Anggaran Komponen/Alat** **Rp 14.510.000**

### 1.3. Anggaran Bahan Habis

#### ATK

##### a. CD + Cashing

Sebagai media backup bagi program multimedia

100 keping x Rp 8.000 Rp 800.000

##### b. Kertas HVS A4

15 rim x Rp 40.000 Rp 600.000

##### c. Ballpoint

3 box x Rp 30.000 Rp 90.000

##### d. Cadtridge/Tinta Printer

15 unit x Rp 350.000 Rp 5.250.000

#### SEWA

##### a. Video Shooting

10 x 12 jam x Rp 900.000 Rp 10.800.000

b. Browsing Internet					
	200 jam	x	Rp 10.000	Rp	2.000.000
<b>Total Anggaran Bahan Penelitian</b>					<b>19.540.000</b>
1.4. Anggaran Perjalanan					
a. Perjalanan Ketua Peneliti ke lokasi penelitian					
	1 x 8 kali	x	Rp 250.000	Rp	2.000.000
b. Perjalanan Anggota Tim ke lokasi penelitian					
	2 x 8 kali	x	Rp 200.000	Rp	3.200.000
c. Perjalanan pembantu penelitian					
	2 x 10 kali	x	Rp 140.000	Rp	2.800.000
<b>Total Anggaran Perjalanan</b>					<b>Rp 8.000.000</b>
1.5. Pengeluaran Lain					
a. Administrasi/dokumentasi peralatan					
	1 x 3 kali	x	Rp 400.000	Rp	1.200.000
b. Pengelolaan Laporan/Publikasi					
	- Pembuatan laporan tahun I			Rp	1.250.000
	- Penggandaan laporan tahun I			Rp	1.100.000
	- Pengiriman laporan/Publikasi tahun I			Rp	400.000
<b>Total Anggaran laporan</b>					<b>Rp. 3.950.000</b>
<b>Total Anggaran Tahun Pertama</b>					<b>Rp. 65.000.000</b>

#### Lampiran 1b. Justifikasi Anggaran Tahun Kedua

1.1. Anggaran Pelaksana Tahun I					
a. Ketua Peneliti (12 jam/minggu) x 10 bulan					
	1 x 10 bulan	x	Rp 500.000	= Rp	5.000.000
b. Anggota Peneliti (10 jam/minggu) x 10 bulan					
	2 x 10 bulan	x	Rp 400.000	= Rp	8.000.000
c. Pembantu Peneliti/Tenaga administrasi (5 jam/minggu)					
	2 x 10 bulan	x	Rp 300.000	= Rp	6.000.000
<b>Total Anggaran Gaji dan Upah</b>					<b>Rp 19.000.000</b>
1.2. Anggaran Komponen/Alat					
a. Pengembangan Instrumen Penelitian berfungsi sebagai pengumpul data dan untuk revisi model (angket, kuisisioner, pretes-postes,					

lembar observasi aktivitas, pedoman wawancara)

1 Unit x Rp 8.000.000 = Rp 8.000.000

b Pengembangan dan penggandaan bahan ajar dan panduan penerapan model

150 Unit x Rp 65.100 Rp 9.765.000

**Total Anggaran Komponen/Alat Rp 17.765.000**

1.3. Anggaran Bahan Habis

ATK

a. CD + Cashing

Sebagai media backup bagi program multimedia

100 keping x Rp 8.000 Rp 800.000

b. Kertas HVS A4

15 rim x Rp 40.000 Rp 600.000

c. Ballpoint

3 box x Rp 30.000 Rp 90.000

d. Cadtridge/Tinta Printer

15 unit x Rp 350.000 Rp 5.250.000

SEWA

a. Video Shooting

10 x 12 jam x Rp 900.000 Rp 10.800.000

b. Browsing Internet

200 jam x Rp 10.000 Rp 2.000.000

**Total Anggaran Bahan Penelitian 19.540.000**

1.4. Anggaran Perjalanan

a. Perjalanan Ketua Peneliti ke lokasi penelitian

1 x 8 kali x Rp 250.000 Rp 2.000.000

b. Perjalanan Anggota Tim ke lokasi penelitian

2 x 8 kali x Rp 200.000 Rp 3.200.000

c. Perjalanan pembantu penelitian

2 x 10 kali x Rp 140.000 Rp 2.800.000

**Total Anggaran Perjalanan Rp 8.000.000**

1.5. Pengeluaran Lain

a.	Administrasi/dokumentasi peralatan					
	1 x 3 kali x Rp 400.000	Rp	1.200.000			
b.	Publikasi Internasional					
	1 x 1 kali x Rp 1.745.000	Rp	1.745.000			
c.	Pengelolaan Laporan/Publikasi					
	- Pembuatan laporan tahun I	Rp	1.250.000			
	- Penggandaan laporan tahun I	Rp	1.100.000			
	- Pengiriman laporan/Publikasi tahun I	Rp	400.000			
	<b>Total Anggaran laporan</b>			<b>Rp.</b>	<b>5.695.000</b>	
	<b>Total Anggaran Tahun Kedua</b>			<b>Rp.</b>	<b>70.000.000</b>	

### Lampiran 1c. Justifikasi Anggaran Tahun Ketiga

#### 1.1. Anggaran Pelaksana Tahun I

##### a. Ketua Peneliti (12 jam/minggu) x 10 bulan

1 x 10 bulan x Rp 500.000 = Rp 5.000.000

##### b. Anggota Peneliti (10 jam/minggu) x 10 bulan

2 x 10 bulan x Rp 400.000 = Rp 8.000.000

##### c. Pembantu Peneliti/Tenaga administrasi (5 jam/minggu)

2 x 10 bulan x Rp 300.000 = Rp 6.000.000

**Total Anggaran Gaji dan Upah Rp 19.000.000**

#### 1.2. Anggaran Komponen/Alat

##### a. Pengembangan Instrumen Penelitian berfungsi sebagai pengumpul data dan untuk revisi model (angket, kuisioner, pretes-postes, lembar observasi aktivitas, pedoman wawancara)

1 Unit x Rp 8.000.000 = Rp 8.000.000

##### b. Pengembangan dan penggandaan bahan ajar dan panduan penerapan model

100 Unit x Rp 65.100 Rp 6.510.000

**Total Anggaran Komponen/Alat Rp 14.510.000**

#### 1.3. Anggaran Bahan Habis

##### ATK

##### a. CD + Cashing

Sebagai media backup bagi program multimedia

100 keping x Rp 8.000 Rp 800.000

##### b. Kertas HVS A4

	15	rim	x	Rp	40.000	Rp	600.000	
c.	Ballpoint							
	3	box	x	Rp	30.000	Rp	90.000	
d.	Cadtridge/Tinta Printer							
	15	unit	x	Rp	350.000	Rp	5.250.000	
	SEWA							
a.	Video Shooting							
	10	x	12	jam	x	Rp	900.000	Rp 10.800.000
b.	Browsing Internet							
	200	jam	x	Rp	10.000	Rp	2.000.000	
	<b>Total Anggaran Bahan Penelitian</b>							<b>19.540.000</b>
1.4.	Anggaran Perjalanan							
a.	Perjalanan Ketua Peneliti ke lokasi penelitian							
	1	x	8	kali	x	Rp	250.000	Rp 2.000.000
b.	Perjalanan Anggota Tim ke lokasi penelitian							
	2	x	8	kali	x	Rp	200.000	Rp 3.200.000
c.	Perjalanan pembantu penelitian							
	2	x	10	kali	x	Rp	140.000	Rp 2.800.000
	<b>Total Anggaran Perjalanan</b>							<b>Rp 8.000.000</b>
1.5.	Pengeluaran Lain							
a.	Administrasi/dokumentasi peralatan							
	1	x	3	kali	x	Rp	400.000	Rp 1.200.000
b.	Pengelolaan Laporan/Publikasi							
						Rp	1.250.000	
						Rp	1.100.000	
						Rp	400.000	
	<b>Total Anggaran laporan</b>							<b>Rp. 3.950.000</b>
	<b>Total Anggaran Tahun Pertama</b>							<b>Rp. 55.000.000</b>

## Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Dr. Erlina Rufaidah, M.Si  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28-08-1958  
NIP : 19580828 198601 2 001  
NPWP : 15.635.828.5-322.000  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala/IV-a  
Pendidikan Terakhir : Pascasarjana S-3  
Bidang Keahlian : Ekonomi  
Unit Kerja : FKIP  
Alamat Rumah : Jln. H. Said No 1 Kota Baru Bandar Lampung  
HP/email : 081293228795/atin\_lin@yahoo.com

### Riwayat Pendidikan

No	Universitas/Institut dan Lokasi	Gelar	Tahun Selesai	Bidang Ilmu
1.	Universitas Lampung	Sarjana S-1	1984	Ekonomi Pembangunan
2.	Universitas Padjajaran	Sarjana S-2	1992	Ekonomi Pertanian
3.	Universitas Sriwijaya	Sarjana S-3	2012	Agribisnis

### Pengalaman Kerja, Pengalaman Profesional dan Kedudukan Saat Ini

No	Institusi	Jabatan	Periode Kerja
1.	SMA Persit Bandung	Wakil Kepala Sekolah	1984-1988
2.	Universitas Islam Bandung	PD 3	1988-1989
3.	Universitas Padjajaran	Dosen Luar Biasa	1989-1990
4.	STIE YPKP Bandung	Kabbag dan Edukatif	1999 – 1991
5.	STIEP Bandung	Dosen Luar Biasa	1990 – 1991
6.	Politeknik Bandung	Direktur Politeknik	1991-1992
7.	Universitas Sriwijaya	Sekretaris PSB	1992-2000
8.	Universitas Lampung	Dosen tetap	2000- Sekarang

### Buku

No	Judul Buku	Tahun
1.	Pengantar Ilmu Ekonomi	2012
2.	Ekonomi Mikro	2002
3.	Pengantar Ekonomi Mikro	2002
4.	Pengantar Ekonomi Makro	2005
5.	Ekonomi Pembangunan	2005
6.	Ekonomi Manajerial	2006

**Mata Kuliah yang Diampu ( 5 Tahun Terakhir )**

No	Mata Kuliah
1.	Pengantar Ilmu Ekonomi
2.	Ekonomi Mikro 1
3.	Ekonomi Mikro 2
4.	Ekonomi Makro
5.	Ekonomi Pembangunan
6.	Perekonomian Indonesia
7.	Ekonomi Politik Dalam Pembangunan
8.	Kewirausahaan

**Daftar Karya Ilmiah ( 5 Tahun Terakhir )**

No	Judul Publikasi	Tahun
1.	Reformasi Pendidikan untuk Menghadapi Tantangan Masa Kini dan Masa Depan	2002
2.	Metodologi Penelitian Linguistik	2002
3.	Pendidikann Demokratis bagi Anak-anak yang Berperilaku Agresif	2005

**Penelitian**

No.	Judul Penelitian	Tahun
1.	Analisis Pemasaran Duku Di Ogan Komering Ilir	2008
2.	Analisis Pemasaran <i>Cassava</i> dan Segmen Pasar Ubi Kayu Di Provinsi Lampung	2009
3.	Analisis Kinerja guru Bersertifikasi di Kecamatan Sekala Berak Lampung Barat Tahun Pelajaran 2014/2015	2014

**Pengabdian**

No.	Judul Kegiatan	Tahun
1.	Pengembangan Potensi Daerah Dengan Loka Karya Dan Penyuluhan Koperasi Unit Desa Di Kecamatan Sekala Berak Kabupaten Lampung Barat	2014
2.	Pembuatan dan Pemasaran Dodol Tomat Di Desa Kampung Baru Kecamatan Raja Basa	2007



	belajar anak mereka pada prodi Pend.Ekonomi IPS FKIP Unila th.1989		
--	--	--	--

### Pengabdian

No	Judul	Jabatan	Tahun
1	Instruktur Pelatihan pendalaman Materi Pelajaran Ekonomi bagi guru-guru SMA se Propinsi Lampung, SumSel dan Bengkulu	Anggota	2012
2	Instruktur pendalaman materi Pelajaran Ekonomi bagi guru-guru SMA Kab.Lampung Utara dan Kab.Tulang Bawang Barat	Anggota	2012
3	Pelatihan Pembelajaran berdasarkan KTSP bagi guru-guru SMK Persada Bandarlampung	Ketua	2011
4	Instruktur Workshop Implementasi KTSP bagi guru-guru SMK se Propinsi Lampung	Anggota	2008
5	Pelatihan Pembelajaran Kontekstual bagi guru-guru SDN 3 Raja basa Bandarlampung	Ketua	2007
6	Pelatihan pembelajaran kontekstual bagi guru-guru SDN 1 Rajabasa Bandarlampung	Ketua	2006
7	Pelatihan kaji tindak dan penulisan karya tulis ilmiah bagi guru-guru SMKN 4 Bandarlampung	Ketua	2005
8	Instruktur Pelatihan terpadu berbasis kompetensi (PTBK) bagi guru-guru SMP Angkatan 1-3 se Propinsi Lampung	Anggota	2005
9	Pelatihan kewirausahaan bagi anak-anak jalanan di Kec Nata lamp Selatan	Anggota	2004
10	Pelatihan karya tulis ilmiah dan kaji tindak bagi guru-guru SMAN 3 dan SMAN 10 dan SMA YP Unila	Anggota	2004
11	Peulatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi guru-guru SD Kec.Pring Sewu	Anggota	2003
12	Pelatihan Penulisan karya ilmiah dan kaji tindak bagi guru-guru Kab.Tanggamus	Anggota	2002
13	Pelatihan kewirausahaan bagi guru-guru SMK kelompok Bisnis dan Manajemen Kota bandarlampung	Ketua	2002
14	Pelatihan kaji tindak dan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru SD Kec. Wonosobo	Anggota	2002
15	Pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru SLTP dan SLTA se Kab.Lampung Timur	Anggota	2001
16	Meningkatkan kemampuan karang taruna dalam bidang organisasi dan manajemen di kampung madiun raja basa bandarlampung	Anggota	1995
17	Bimbingan untuk meningkatkan penggunaan media Pendidikan bagi guru-guru SMU YP Unila	Anggota	1995
18	Penyuluhan tentang pemanfaatan Media Pendidikan Bagi guru-guru Bidang Studi Ekonomi Koperasi SMA Swasta Bandarlampung	Ketua	1994
19	Penyuluhan Koperasi bagi guru-guru SD Se Kec Batang Hari	Ketua	1993
20	Latihan Kepemimpinan Manajemen Bagi pengurus Karang Taruna Kec Jabung	Anggota	1991
21	Penyuluhan Koperasi bagi Masyarakat Desa Sumberrejo Kec.Batang hari Lamp.Sel	Ketua	1991

22	Penyuluhan Koperasi bagi Masyarakat Desa Karang Anyar Kec.Tanjung Bintang Lamp.Sel.	Ketua	1990
----	--	-------	------

#### Karya Ilmiah

No	Judul	Tahun	Jenis	Kategori
1	Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan	2005	Publikasi Ilmiah	Internasional
2	Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan PTPN VII Bandar Lampung	2004	Publikasi Ilmiah	Lokal

#### Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun
1	Workshop penyusunan kurikulum PPG	2010
2	Workshop Implementasi KTSP (TOT)	2008
3	Workshop Pengembangan KBK untuk Perguruan Tinggi	2008
4	Pelatihan Teknik analisis Soal untuk dosen Unila	2004
5	Pelatihan Sistem Informasi Akademik Unila	2003
6	Pelatihan Aplikasi Statistika bagi dosen Unila( Due Project)	1999
7	Pelatihan Aplied Software computer	1998
8	Kursus PDETC (Pre Departure English Training Course)	1997
9	Penataran TOT di Pemda Tk I Propinsi Lampung	1996
10	Pelatihan metodologi pengabdian pada masyarakat	1992
11	Kusus dan pelatihan penerjemahan buku ajar	1991
12	Kursus Metodologi Penelitian	1987



### Pengabdian

No	Judul	Jabatan	Tahun
1	Pelatihan Peningkatan Pemahaman Konsep dan Masalah Miskonsepsi Fisika Bagi Guru Fisika SMA/MA kota Bandar Lampung	Anggota	2013
2	IbM MGMP SMA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Laboratorium dan Sumber Belajar	Ketua	2012
3	Pelatihan Classroom Management bagi Guru IPA di kabupaten Way Kanan	Ketua	2011
4	Peningkatan Kapasitas Manajemen Laboratorium bagi Kepala Laboratorium IPA SMA se kota Bandar Lampung	Anggota	2010
5	Pelatihan Penggunaan Spread Sheet MS Excel untuk Pengolahan Data Penelitian bagi MGMP Fisika se Kota Bandar Lampung	Ketua	2007

### Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Tahun	Institusi
1	Dosen Berprestasi III Universitas Lanmpung	2012	Universitas Lampung
2	Dosen Berprestasi I TK FKIP Unila	2011	FKIP Unila
3	Dosen Teladan II	2007	FKIP Unila
4	Dosen dengan Kinerja Pembelajaran Terbaik II	2005	FKIP Unila
5	Dosen dengan Kinerja Pembelajaran Terbaik II Tk FKIP Universitas Lampung	2004	FKIP Unila

### Karya Ilmiah

No	Judul	Tahun	Jenis
1	Identifikasi PCK Calon Guru Fisika melalui Pembelajaran Berbasis Multirepresentasi	2013	Publikasi Ilmiah
2	Model Pembelajaran EXCLUSIVE	2012	Prototipe
3	Modul Pembelajaran Perubahan Iklim di Bandar Lampung	2012	Modul Pembelajaran
4	Implementasi Pembelajaran Berbasis Multirepresentasi untuk Peningkatan Pnguasaan Konsep Fisika Kuantum	2011	Publikasi Ilmiah
5	Students's Representation Preferences in Learning Physics and "Thematic Pre-conception" in Quantum Physics Concept	2009	Prosiding
6	Limitation of Representation Mode in Learning Gravitational Concept and Its Influence toward Student Skill Problem Solving	2008	Prosiding
7	Application of Ethno-Science's Driver Model to increase Activity and Mastery Concept of Temperature and Expansion	2008	Prosiding
8	The Use of Paperblog Worksheet for enhancing Student's Interest and Understanding Optic Concept	2007	Prosiding
9	Meningkatkan Aktivitas dan Penguasaan Konsep Energi melalui Analogi dan Demonstrasi Siswa SMA	2006	Prosiding

Kegiatan			
No	Kegiatan	Tahun	Peranan
1	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Instruktur Sekolah Polisi Negara (SPN)	2013	Nara Sumber
2	Peningkatan Kompetensi Guru MIPA di Kabupaten Pesawaran	2012	Nara Sumber
3	Konsultasi Pelatih DAPS (Disaster Awareness in Primary School) – Program Sosialisasi Pendidikan Siaga Bencana di Sekolah Dasar Rawan Bencana	2008	Nara Sumber
4	Konsultasi Pelatih DAPS (Disaster Awareness in Primary School) – Program Sosialisasi Pendidikan Siaga Bencana di Sekolah Dasar Rawan Bencana	2008	Nara Sumber
5	Konsultasi Pelatih SEQIP (Science Education Quality Improvement Project)-Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran Sains di daerah Pelosok (Terpencil)	2007	Nara Sumber
6	Konsultasi Pelatih DAPS (Disaster Awareness in Primary School) – Program Sosialisasi Pendidikan Siaga Bencana di Sekolah Dasar Rawan Bencana	2007	Nara Sumber
7	Konsultasi Pelatih SEQIP (Science Education Quality Improvement Project)-Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran Sains di daerah Pelosok (Terpencil)	2006	Nara Sumber
8	Konsultasi Pelatih SEQIP (Science Education Quality Improvement Project)-Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran Sains di daerah Pelosok (Terpencil)	2005	Nara Sumber

#### Jurnal

No	Judul	Dimuat Dalam Jurnal				
		Nama Jurnal	Tahun	Volume	No Registrasi	Kategori
1	Implementasi Pembelajaran Multi Representasi untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Fisika Kuantum	Cakrawala	2011	Vol. XXX, No. 1, 2011	2	Nasional Terakreditasi
2	Pengembangan Program Pembelajaran Mitigasi Bencana Alam Gempa Bumi bagi Siswa SMP	Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran	2011	XX	3	Nasional Terakreditasi
3	Penerapan Model Pembelajaran Collaborative Teamwork Learning untuk Meningkatkan Penguasaan Matakuliah Fisika Kuantum Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lampung	Jurnal Pendidikan MIPA	2005	Vol. 2 No. 1	1	ISSN

**Jabatan**

No	Jabatan	Institusi	Tahun
1	Ketua Program Studi S2 Keguruan IPA	FKIP Universitas Lampung	2014 - Sekarang
2	Ketua Unit Penjaminan Mutu	FKIP Unila	2012 - 2014
3	Ketua Unit Database dan Publikasi Ilmiah	FKIP Unila	2010 - 2012
4	Kepala Laboratorium Komputasi Pendidikan	FKIP Unila	2004 - 2006

**Organisasi**

No	Organisasi	Institusi	Tahun
1	Wakil Ketua	Himpunan Fisikawan Indonesia Cabang Lampung	2013 - sekarang
2	Ketua Bidang Rumpun Keilmuan	Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Daerah Lampung	2012 - sekarang
3	Ketua Bidang Organisasi	Mathlaul Anwar Wilayah Lampung	2011 - sekarang
4	Pembina	Asosiasi Guru Fisika Indonesia (AGPI)	2009 - skrg

## ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN

### Petunjuk Pengisian Angket

- a) Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan seksama kemudian pilihlah jawaban yang Bapak/Ibu rasa paling tepat dengan cara membubuhkan tanda silang (x) pada kotak jawaban yang Bapak/Ibu pilih.
- b) Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa isian, jawablah sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu.

### Identitas Responden

1. Jenis Kelamin  
( ) Pria  
( ) wanita
2. Usia Bapak/Ibu  
( )  $\leq 25$  tahun  
( ) 26-33 tahun  
( ) 34-41 tahun  
( ) 42-49 tahun  
( )  $\geq 50$  tahun
3. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu  
( ) SMU  
( ) D1-D3  
( ) S1-S3

### **Angket**

1. Apakah di sekolah Anda terdapat koperasi sekolah?  
 Ada     Tidak Ada     Tidak Tahu
2. Sudah berapa lama koperasi sekolah tersebut berdiri? .....
3. Apakah ada struktur kepengurusan koperasi sekolah di sekolah Anda?  
 Ada     Tidak Ada     Tidak Tahu
4. Apakah sudah ada keterlibatan komite sekolah terhadap koperasi sekolah di sekolah Anda?  
 Ada     Tidak Ada     Tidak Tahu

5. Jika ada , sudah berapa lama komite sekolah dilibatkan dalam koperasi sekolah? .....
6. Apakah ada peran komite sekolah terhadap perkembangan koperasi sekolah ?  
 Ada     Tidak Ada     Tidak Tahu
7. Jika ada, uraikan peran komite sekolah terhadap perkembangan koperasi sekolah? .....
8. Apakah di sekolah Anda ada siswa yang mengikuti program bina lingkungan (BILING) ?  
 Ada     Tidak Ada     Tidak Tahu
9. Jika ada, bagaimana latar belakang keluarga dari siswa tersebut? .....
10. Apakah ada kontribusi siswa/orang tua siswa program BILING terhadap kegiatan sekolah?  
 Ada     Tidak Ada     Tidak Tahu
11. Jika ada, bagaimanakah bentuk kontribusi siswa /orang tua siswa program BILING terhadap kegiatan sekolah? .....

## BORANG ISIAN PENELITIAN

Nama Peneliti : Dr. Erlina Rufaida, M.Si  
Anggota : 1. Drs. Yorizal, M.Si  
2. Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, M.Si  
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN  
KOPERASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
MELALUI PENINGKATAN PERAN KOMITE SEKOLAH  
DI KOTA BANDARLAMPUNG  
SKIM Penelitian : Hibah Bersaing  
Bidang Ilmu : Pendidikan Ekonomi  
Sumber Dana : DIKTI  
Tahun ke 1 : Rp. 42.500.000,-  
Tahun ke 2 : Rp. 50.000.000,-  
Tahun ke 3 : Rp. 55.000.000,-  
Tanggal Kontrak : .....

**Hasil Penelitian** :  
Tahun I : Jurnal Pendidikan Progresif (Nasional)  
Judul : OPTIMALISASI KOMITE SEKOLAH DALAM  
PENGEMBANGAN KOPERASI SEKOLAH DI BANDAR  
LAMPUNG  
Tahun II : Jurnal/Buku  
Judul : *School Board Empowerment for School Cooperation in  
Good Governed Context*  
Tahun III : Paten  
Judul : SBECS Model

Mengetahui,  
a.n. Ketua,  
Sekretaris LPPM Unila,

Peneliti,

Drs. I Komang Winatha, M.Si.  
NIP. 19600417 198711 1001

Dr. Erlina Rufaida, M.Si  
NIP.

Keterangan:

\*) Coret yang tidak dipilih, bila memilih *Lainnya* harap mengisi isian disamping.

### INSTRUMEN VALIDASI AHLI

**Produk: TBS Model(SBECS): *School Board Empowerment for Cooperation at Schools*  
(Peningkatan Koperasi Sekolah melalui Penguatan Komite Sekolah)**

**Petunjuk:**

1. Pilihlah satu respon dengan cara memberi tanda *check list* (✓) pada pilihan respon yang dianggap sesuai.

Contoh:

- Sangat baik
- Baik
- Tidak baik
- Sangat tidak baik

2. Angket ini digunakan sebagai bahan untuk perbaikan SBECS yang telah dikembangkan untuk keperluan penelitian
3. Tulislah saran/masukan untuk perbaikan pada kolom yang telah disediakan.

No	Kriteria yang diuji	Pilihan Respon	Saran
A.	<b>Kesesuaian</b>		
1.	Seberapa baik SBECS yang berhasil dikembangkan terkait dengan tujuan utama dikembangkannya model kopersisekolah?	<input type="radio"/> Sangat baik <input type="radio"/> Baik <input type="radio"/> Tidak baik <input type="radio"/> Sangat tidak baik	
2.	Seberapa layak SBECS jika diimplementasikan sebagai model pengembangankopersisekolah?	<input type="radio"/> Sangat layak <input type="radio"/> Layak <input type="radio"/> Tidak layak <input type="radio"/> Sangat tidak layak	
3.	Bagaimana kesesuaian antara konsep alur atau proses yang dihadirkan SBECS dengan konsep alur model pemberdayaan komitesekolah?	<input type="radio"/> Sangat sesuai <input type="radio"/> Sesuai <input type="radio"/> Tidak sesuai	

No	Kriteria yang diuji	Pilihan Respon	Saran
4.	Seberapa baik keintergrasian antara keseluruhan alur SBECS jika dikaitkan dengan konsep model pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana?	<input type="radio"/> Sangat tidak sesuai <input type="radio"/> Sangat baik <input type="radio"/> Baik <input type="radio"/> Tidak baik <input type="radio"/> Sangat tidak baik	
5.	Bagaimana sistematika SBECS dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam komunitas belajar?	<input type="radio"/> Sangat sistematis <input type="radio"/> Sistematis <input type="radio"/> Tidak sistematis <input type="radio"/> Sangat tidak sistematis	
6.	Bagaimana urutan alur atau proses yang dipaparkan SBECS agar bersifat implementatif?	<input type="radio"/> Sangat berurutan <input type="radio"/> Berurutan <input type="radio"/> Tidak berurutan <input type="radio"/> Sangat tidak berurutan	
7.	Seberapa relevan teori dan daftar rujukan yang digunakan dalam pengembangan SBECS?	<input type="radio"/> Sangat relevan <input type="radio"/> Relevan <input type="radio"/> Tidak relevan <input type="radio"/> Sangat tidak relevan	
8.	Seberapa sesuai penggunaan bahasa yang digunakan dalam SBECS untuk memudahkan stakeholders memahaminya?	<input type="radio"/> Sangat sesuai <input type="radio"/> Sesuai <input type="radio"/> Tidak sesuai <input type="radio"/> Sangat tidak sesuai	
<b>B. Ruang Lingkup</b>			
9.	Seberapa lengkap SBECS sebagai model yang berfokus pada mitigasi bencana berbasis komunitas belajar masyarakat?	<input type="radio"/> Sangat lengkap <input type="radio"/> Lengkap <input type="radio"/> Tidak lengkap <input type="radio"/> Sangat tidak lengkap	

No	Kriteria yang diuji	Pilihan Respon	Saran
10.	Seberapa spesifik tingkat kerincian alur SBECS terkait dengan tujuan pengembangan dan penerapan khususnya di lingkungan sekolah dengan tingkat kerawanan bencana?	<input type="radio"/> Sangat spesifik <input type="radio"/> Spesifik <input type="radio"/> Tidak spesifik <input type="radio"/> Sangat tidak spesifik	
11.	Seberapa baik alur SBECS yang berhasil dikembangkan untuk melibatkan stakeholders pada keseluruhan proses yang bersifat teknis dan teoritis berdasarkan tujuan pengembangan?	<input type="radio"/> Sangat baik <input type="radio"/> Baik <input type="radio"/> Tidak baik <input type="radio"/> Sangat tidak baik	
12.	Seberapa baik alur SBECS mampu mewakili seluruh proses utama dari model pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana?	<input type="radio"/> Sangat baik <input type="radio"/> Baik <input type="radio"/> Tidak baik <input type="radio"/> Sangat tidak baik	
13.	Apakah SBECS memungkinkan untuk diterapkan secara langsung pada masyarakat dengan latar belakang yang heterogen?	<input type="radio"/> Sangat mungkin <input type="radio"/> Mungkin <input type="radio"/> Tidak mungkin <input type="radio"/> Sangat tidak mungkin	
<b>C. Konsistensi</b>			
14.	Bagaimana tingkat konsistensi dari istilah yang digunakan dalam SBECS?	<input type="radio"/> Sangat konsisten <input type="radio"/> Konsisten <input type="radio"/> Tidak konsisten <input type="radio"/> Sangat tidak konsisten	
15.	Bagaimana tingkat konsistensi dari bahasa yang digunakan dalam SBECS?	<input type="radio"/> Sangat konsisten <input type="radio"/> Konsisten <input type="radio"/> Tidak konsisten <input type="radio"/> Sangat tidak konsisten	
16.	Bagaimana tingkat konsistensi dari struktur SBECS?	<input type="radio"/> Sangat konsisten <input type="radio"/> Konsisten <input type="radio"/> Tidak konsisten	

No	Kriteria yang diuji	Pilihan Respon	Saran
		o Sangat tidak konsisten	
<b>D. Kejelasan</b>			
17.	Bagaimana kejelasan istilah yang digunakan dalam SBECS?	<input type="radio"/> Sangat jelas <input type="radio"/> Jelas <input type="radio"/> Tidak jelas <input type="radio"/> Sangat tidak jelas	
18.	Bagaimana kejelasan bahasa yang digunakan dalam SBECS?	<input type="radio"/> Sangat jelas <input type="radio"/> Jelas <input type="radio"/> Tidak jelas <input type="radio"/> Sangat tidak jelas	
19.	Seberapa mudah untuk memahami alur operasional SBECS?	<input type="radio"/> Sangat mudah <input type="radio"/> Mudah <input type="radio"/> Tidak mudah <input type="radio"/> Sangat tidak mudah	
20.	Seberapa jelas penyajian dari SBECS (bagan/skema alur dan deskriptif)?	<input type="radio"/> Sangat jelas <input type="radio"/> Jelas <input type="radio"/> Tidak jelas <input type="radio"/> Sangat tidak jelas	
21.	Seberapa jelas hubungan bagan/skema alur dengan penjelasan deskriptif dari SBECS?	<input type="radio"/> Sangat jelas <input type="radio"/> Jelas <input type="radio"/> Tidak jelas <input type="radio"/> Sangat tidak jelas	
<b>E. Kemudahan Penggunaan</b>			
22.	Seberapa sedikit pengetahuan awal yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menginterpretasi kerangka operasional SBECS?	<input type="radio"/> Sangat sedikit <input type="radio"/> Sedikit <input type="radio"/> Tidak sedikit <input type="radio"/> Sangat tidak sedikit	
23.	Berdasarkan alur operasional yang telah dipaparkan	<input type="radio"/> Sangat mudah	

No	Kriteria yang diuji	Pilihan Respon	Saran
	dalam SBECs, seberapa mudah alur tersebut untuk dipahami?	<input type="radio"/> Mudah <input type="radio"/> Tidak mudah <input type="radio"/> Sangat tidak mudah	
24.	Berdasarkan alur operasional yang telah dipaparkan dalam SBECs, seberapa mudah alur tersebut untuk diterapkan?	<input type="radio"/> Sangat mudah <input type="radio"/> Mudah <input type="radio"/> Tidak mudah <input type="radio"/> Sangat tidak mudah	
25.	Apakah deskripsi alur operasional dalam SBECs dapat memudahkan pengguna untuk mengaplikasikan SBECs?	<input type="radio"/> Sangat memudahkan <input type="radio"/> Memudahkan <input type="radio"/> Tidak memudahkan <input type="radio"/> Sangat tidak memudahkan	
26.	Seberapa mudah SBECs untuk diadaptasi pada situasi yang berbeda dalam konteks mitigasi kebencanaan secara umum?	<input type="radio"/> Sangat mudah <input type="radio"/> Mudah <input type="radio"/> Tidak mudah <input type="radio"/> Sangat tidak mudah	
<b>F. Kedalaman</b>			
27.	Bagaimana karakteristik SBECs terkait dengan tujuan pengembangan dan konteks masalah yang dihadapi?	<input type="radio"/> Sangat berkarakter <input type="radio"/> Berkarakter <input type="radio"/> Tidak berkarakter <input type="radio"/> Sangat tidak berkarakter	
28.	Bagaimana sifat kekhususan SBECs dengan konteks situasi yang dihadapi?	<input type="radio"/> Sangat spesifik <input type="radio"/> Spesifik <input type="radio"/> Tidak spesifik <input type="radio"/> Sangat tidak spesifik	
29.	Seberapa detail alur operasional SBECs terkait dengan tujuan pengembangan dan konteks situasi	<input type="radio"/> Sangat detail <input type="radio"/> Detail	

No	Kriteria yang diuji	Pilihan Respon	Saran
	yang dihadapi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak detail</li> <li>o Sangat tidak detail</li> </ul>	
<b>G. Keoperasionalan</b>			
30.	Apakah SBECS berpotensi dapat diimplementasikan secara terorganisir dan terstruktur dengan melibatkan semua stakeholders?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sangat mungkin</li> <li>o Mungkin</li> <li>o Tidak mungkin</li> <li>o Sangat tidak mungkin</li> </ul>	
31.	Bagaimana sifat keoperasionalan SBECS untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap resiko bencana?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sangat operasional</li> <li>o Operasional</li> <li>o Tidak operasional</li> <li>o Sangat tidak operasional</li> </ul>	

Bandar Lampung, Oktober 2015  
Validator,

\_\_\_\_\_  
NIP.

# OPTIMALISASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI SEKOLAH DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

*Rufaida, E., Zakaria, W.A., dan Yonrizal*

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

E-mail: atin\_lin@yahoo.com

**Abstrak:** Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran strategis untuk mengembangkan komponen sekolah secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi sekolah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah, usaha-usaha komite sekolah di SMP di Kota Bandar Lampung serta mengembangkan model kemitraan koperasi sekolah dan komite sekolah. Fokus penelitian penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam mengembangkan kewirausahaan melalui koperasi sekolah serta upaya komite sekolah dalam membangun koperasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan rancangan riset pengembangan model. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, studi dokumentasi dan pengembangan model. Teknik untuk keabsahan data menggunakan triangulasi data. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite sekolah dapat berperan dalam pengembangan kewirausahaan pada kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat dengan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat agar mengetahui potensi mereka.

**Kata kunci :** komite sekolah, koperasi sekolah, kewirausahaan

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Di antara faktor tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Mulai bantuan pemikiran, sarana dan prasarana, pembiayaan serta aspek lain. Selain itu, kinerja kepala sekolah juga menjadi kuncikeberhasilan pendidikan. Kedua unsur ini perlu melakukan kerjasama kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara yuridis, tuntutan keterlibatan masyarakat itu ditetapkan dalam Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah sebagai organisasi mitra

sekolah memiliki peran salah satu peran komite sekolah dalam mewujudkan koperasi sekolah di sekolah yaitu sebagai badan pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu bagaimana strategi mengelola lembaga sekolah dengan menggunakan konsep koperasi sekolah yang menguntungkan bagi sekolah dan siswa, dengan cara lebih mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya.

Peranan komite sekolah dalam mengembangkan koperasi (kewirausahaan) juga merupakan bagian dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. MBS merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan MBS dapat diidentifikasi. Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan penulis mengemukakan gejala problematis yang terjadi pada komite sekolah dalam mengembangkan koperasi adalah komite sekolah sebagai unit kewirausahaan di sekolah kurang maksimal dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan mutu sekolah, usaha-usaha produksi komite sekolah kurang menggunakan partisipasi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat kurang berantusias dalam meningkatkan mutu sekolah, belum maksimal hubungan komite sekolah dengan pihak terkait (masyarakat dan wali siswa) dalam mengembangkan koperasi untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap upaya komite sekolah mulai tumbuh karena adanya unit usaha-usaha pada level sekolah seperti koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain. Bahkan hal ini tidak hanya di lingkup sekolah saja, tetapi juga diperjualbelikan keluar sekolah. Hal inilah yang mewujudkan mutu sekolah yang semakin tahun semakin meningkat karena sebagian besar biaya operasional sekolah didapat dari koperasi sekolah.

Hasil dari unit usaha-usaha yang dibangun komite sekolah dari jaringan internal maupun jaringan eksternal yang di ikuti oleh partisipasi masyarakat diwujudkan sebagai peningkatan sumber daya seperti tenaga pendidik, tenaga non

kependidikan, dan sarana prasarana seperti kelengkapan kelas mulai dari LCD, proyektor, AC, dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian studi kasus tentang “Optimalisasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Koperasi Sekolah Di Bandar Lampung”.

Masalah dalam penelitian ini mengenai, peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi di SMP di kota Bandar Lampung selanjutnya masalah tersebut menjadi sebuah fokus masalah yaitu sebagai berikut: 1) Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah; 2) Peran komite sekolah ; 3) Upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi di SMP di kota Bandar Lampung.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta model kemitraan yang dikembangkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara wawancara. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah simpulan. Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas yang dengan memperpanjang masa penelitian (observasi), meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan, triangulasi dan *Member cheks*.

## **Komite Sekolah**

### **1. Pengertian komite sekolah**

Secara resmi konsep komite sekolah mulai digulirkan sejak tanggal 2 April 2002 meskipun fungsinya yang secara spesifik lokal mungkin saja telah ada yang menjalankannya jauh lebih dahulu sebelumnya. Pembentukan komite sekolah juga didasarkan pada pasal 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas Nomor

044/U/2002 dan pasal 56 Undangundang Sistem Pendidikan Nasional 2003, di atas serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah.

## **2. Fungsi dan peran komite sekolah**

Komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menurut keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 adalah sebagai berikut. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/dunia usaha/organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Adapun fungsi komite sekolah sudah di jelaskan diatas tidak terkecuali peran komite sekolah juga merupakan sinergi untuk meningkatkan mutu sekolah. Lembaga komite sekolah ini memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 56 ayat 3.

Peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi dengan guru maupun dengan pihak terkait (masyarakat) sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah melalui usaha-usaha yang di laksanakan komite sekolah. Menurut Hasbullah (2010:92) “secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai

berikut. Komite sekolah/ madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Wadah Komite Sekolah**

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. “Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama” (Hasbullah 2010:93).

### **4. Hubungan Sekolah dan Masyarakat**

Istilah hubungan sekolah dengan masyarakat, menurut Oemi Abdurrachman (Suryosubroto, 2004: 155) ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, *good will*, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Ibnu Syamsi (Suryosubroto, 2004: 155) “hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan penerangan yang lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya”. Selain itu pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah.**

Temuan peneliti, komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah awalnya dari kinerja komite sekolah yang melibatkan otonomi sekolah, seperti komite sekolah,

kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat. Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah yaitu membangun unit usaha yang berbagai macam unit usaha untuk meningkatkan mutu sekolah diantaranya unit usaha komite sekolah yaitu: koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam/konveksi mikro, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain

1. Unit usaha koperasi simpan pinjam adalah unit usaha yang dibangun komite sekolah. Unit usaha ini dapat mengakomodir beberapa keperluan warga sekolah, bahkan bisa dari luar dengan ketentuan tertentu. Laba dari unit usaha digunakan sebagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah.
2. Unit usaha penyediaan ATK, adalah unit usaha komite sekolah yang dipasarkan di sekolah yang membutuhkan. Laba unit usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah.
3. Unit usaha konveksi mikro yang dibangun komite sekolah dipasarkan ketoko-toko diluar sekolah, karena unit usaha ini banyak manfaatnya, laba dari unit usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk kegiatan sekolah.
4. Unit usaha percetakan merupakan unit usaha yang dibangun koperasi sekolah dan dikelola oleh anggota komite sekolah dan sebagai tenaga pendidik. Unit koperasi sekolah ini memberi pelayanan siswa dan tenaga pendidik, buku paket, lembar kerja siswa dikelola oleh koperasi sekolah. Laba unit usaha koperasi sekolah tidak seperti unit usaha lain, usaha koperasi mengambil laba yang sedikit, sehingga laba dari unit usaha koperasi sekolah sebagai tambahan dana kegiatan sekolah.

Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah mempunyai dua sasaran pokok bagi sekolah sendiri dan siswa SMP di kota Bandar Lampung. Bagi sekolah dari laba usaha atau produksi digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dan bagi siswa untuk lapangan praktek karena sesuai dengan sekolah kejuruan, sehingga praktek lapangan bisa dilakukan di lingkup sekolah. Ini sejalan oleh Depdiknas (1998:5) dalam buku "pedoman pembinaan pengembangan koperasi sekolah di sekolah" sebagai berikut. Dalam rangka menumbuhkan koperasi sekolah pada lembaga sekolah hendaknya diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu siswa dan lembaga sekolah. Pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi sekolah melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler, yang dapat dimanfaatkan di masyarakat kelak. Sedangkan pengembangan koperasi sekolah bagi lembaga sekolah dapat ditempuh dengan mendirikan badan usaha yang menghasilkan laba (*profit taking*), yang dapat digunakan untuk menunjang biaya proses pendidikan. Melalui cara tersebut,

diharapkan lembaga sekolah lebih bergairah dan produktif, menyejahterakan sivitas sekolah, serta siswa memiliki bekal kecakapan hidup (*life skills*).

Berdasarkan hasil data wawancara dan observasi, peneliti berpendapat untuk langkah ke depan dalam pengembangan unit koperasi sekolah yang dibangun oleh komite sekolah adalah; (a) komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah harusnya juga melibatkan siswa, seperti unit usaha yang di miliki mengarah pada kejuruan yang ada sehingga siswa-siswi SMP di kota Bandar Lampung ikut andil di usaha-usaha yang dibangun komite sekolah, sebagai contoh untuk lapangan praktik bagi siswa agar menciptakan jiwa kewirausahaan sekolah bagi siswa-siwi, (b) Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah harus pandai memanfaatkan peluang, mencari potensi baik itu sumber daya manusia maupun tempat. Depdiknas (1998:5) dalam buku “pedoman pembinaan pengembangan koperasi sekolah di” menjelaskan bahwa. Potensi-potensi tersebut kemudian dianalisis dengan cermat, sehingga dapat dipilih jenis usaha produksi/jasa yang paling tepat yang dipercaya efektif dan berkembang ke depan, serta menentukan tindakan yang tepat untuk mengimplementasikannya.

## **B. Peran Komite Sekolah**

Berdasarkan temuan penelitian peran komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung ini kurang maksimal sehingga terjadi kendala kendala indikator peran komite tidak maksimal, karena komite sekolah disini hanya berkecenderungan pada indikator peran komite sekolah sebagai badan pendukung, seperti yang diungkapkan oleh kepala komite sekolah komite sekolah diSMP ini, itu sudah berjalan dengan semestinya tapi masih kurang maksimal dari keempat peran komite sekolah yang semestinya sebagai berikut.

1. Peran pertama sebagai pertimbangan, disini komite SMP di kota Bandar Lampung sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, mendirikan musholah dan rencana pembangunan laboratorium media komputer. Selain itu, komite mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.
2. Peran kedua pendukung ini merupakan ke aktifan dari komite sekolah wujudnya seperti membangun unit usaha yang dibangun oleh komite sekolah, merupakan dukungan finansial, tenaga, dan pikiran. Pikiran yang diberikan komite sekolah, seperti adanya unit usaha sebagai peningkatan mutu sekolah. Unit usaha komite

sekolah ini digunakan sebagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, sebagai biaya kegiatan sekolah. Komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung ini juga melihat anggaran sekolah karena sebgai besar dana diperoleh dari unit usaha komite sekolah. Ini sejalan dengan indikator peran komite sekolah sebagai pendukung.

3. Peran sebagai pengontrol, setiap satu bulan sekali selalu rapat, laporan perkembangan sekolah, perkembangan sekolah ini meliputi tenaga pendidik, sarana prasarana, keadaan siswa dan perkembangan usaha, dan laporannya itu berupa LPJ.
4. Peran sebagai mediator, pemerintah, sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat, menampung aspirasi-aspirasinya beliau, sebagai masukan pendapat dari mereka semua itu untuk membenahan menuju sekolah yang bermutu. Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah.

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Ini sejalan dengan Ace Suryani dan Dasim Budimansyah (dalam Hasbullah, 2010:96) dari aspek manajemen pendidikan, perencanaan, pelaksanaan program dan pengelolaan program. Dari indikator kinerja menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah, mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah, mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah. mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan bantuan masyarakat Komite sekolah diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota-anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi

juga pada hal-hal yang dapat diadakan bersama, seperti membentuk sistem belajar yang baik, turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus mengeluarkan uang. Komite sekolah ini sangat mendorong tumbuhnya perhatian kepada masyarakat terhadap peningkatan mutu sekolah.

Hal ini sejalan dengan keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/dunia usaha atau organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

### **C. Upaya Komite Sekolah dalam Mengembangkan koperasi**

Berdasarkan temuan penelitian upaya yang dilakukan oleh SMP di kota Bandar Lampung adalah temuan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan melibatkan masyarakat sebagai pekerja unit usaha komite sekolah, mendirikan paguyuban wali murid dengan pengembangan unit usaha. Menurut Hasbullah (2010:93) "Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas". Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang

diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Dengan demikian keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam wujud komite sekolah mengembangkan koperasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Menurut Mulyasa (2004:27) menjelaskan “MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih”. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah.

Oleh karena itu komite sekolah SMP di kota Bandar Lampung ini sejalan dengan teori Hasbullah. Dengan demikian keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan komite mengembangkan koperasi untuk meningkatkan mutu sekolah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Menurut Mulyasa (2004:27) menjelaskan “MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih”.

Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah, bahwa dalam meningkatkan mutu sekolah atau penyelenggaraan pendidikan melalui upaya yang dibangun komite sekolah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dengan mempromosikan unit usaha komite sekolah. Sehingga komite sekolah tidak hanya semata-mata sebagai nama komite sekolah semata. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Mulyasa (2006: 50)

menyatakan “hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah”.

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan, keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan oleh guru di sekolah. Orang tua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh para guru.

Pengertian hubungan masyarakat di atas, sedikitnya ada dua kepentingan dalam manajemen pendidikan. Pertama, kepentingan sekolah, yang dapat dilihat dari pemberian informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat, sehingga masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap sekolah. Kepentingan lain agar sekolah dapat mengerti berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan usaha pendidikan pada umumnya. Kedua, dilihat dari segi kepentingan masyarakat, maka masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Pengertian, penerimaan dan pemahaman masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat terhadap sekolah.

Berdasarkan temuan peneliti berpendapat upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi sudah sejalan dengan teori di atas hubungan masyarakat terhadap sekolah sangat terjalin baik, karena partisipasi masyarakat, orang tua siswa, hubungan masyarakat diwujudkan dalam mengembangkan koperasi untuk peningkatan mutu sekolah. Akan tetapi peneliti menyarankan untuk membangun usaha juga melibatkan para siswa yang sesuai bidang kejuruan.

Adapun manfaat koperasi sekolah bagi siswa yang telah dijelaskan menurut Depdiknas, (2001:4-5) menjelaskan sebagai berikut. Pengembangan koperasi sekolah sekolah juga diharapkan memberikan keuntungan kepada siswa, dimana dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi sekolah dan

manajerial tingkat sederhana untuk mengelola dan memasarkan suatu produk, dalam bentuk kurikuler, dan aktra kurikuler.

Agar lebih efektif, maka siswa juga hendaknya terlibat aktif terlibat secara langsung dalam pengembangan unit produksi/jasa sekolah atau, bekerja sama dengan instansi mitra lain terkait melalui program pendidikan sistem ganda atau *dual system education*. Melalui pola ini, selain siswa dapat mempraktekan pendidikan dan pelatihan teoritis terhadap dunia nyata sebenarnya, juga dapat menemukan kendala serta peluang dan atau menemukan ide-ide usaha baru yang lebih baik ke depan.

Menurut Depdiknas (2001:9) menjelaskan sebagai berikut. Pada akhirnya nanti, jika mereka lulus atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi memiliki alternatif-alternatif dalam meniti masa depannya, terutama mampu menciptakan lapangan kerja terutama bagi dirinya sendiri serta berpartisipasi menggerakkan ekonomi masyarakat sesuai kondisi lingkungan fisik dan sosio budaya di masyarakatnya. Sehingga, pada diri siswa akan tertanam minat minat dan kemampuan untuk berpartisipasi membangun secara nyata daerah atau lingkungannya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah mempunyai unit usaha yang berbagai macam unit usaha untuk meningkatkan mutu sekolah. Diantaranya unit koperasi sekolah yang dibangun komite sekolah yaitu, unit koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain. Peran komite sekolah dalam menjalankan indikator kinerja komite sekolah, ada empat peran komite sekolah yaitu sebagai pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol dan sebagai mediator.

Dari keempat peran komite sekolah tersebut, perlu ada peran perlakuan khusus terhadap komite sekolah yang kurang maksimal dan dianggap peran yang paling dimudah atau remehkan oleh komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung. Upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi yaitu melibatkan partisipasi kepala sekolah, partisipasi tenaga pendidik, partisipasi orang tua siswa,

dan masyarakat, mendirikan paguyuban wali murid, dan menyebarkan promosi dengan media massa seperti *brosur dan spanduk*, mengadakan kerjasama dengan unit usaha luar. Kedepan, diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan informasi dalam melakukan penelitian di bidang yang sama tentang peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi, dengan melibatkan partisipasi orang tua siswa dan partisipasi masyarakat sehingga antara komite sekolah dan hubungan masyarakat berperan dalam mewujudkan mutu sekolah. Semoga penelitian ini dijadikan bahan pustaka dalam mengerjakan laporan, dan peneliti berharap agar mengembangkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Peneitian*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwin. 2010. *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung: ALFABETA.
- Depdiknas. 1998. *Koperasi sekolah (Enterpreneurship) dalam Pendidikan: Materi Pelatihan Calon Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdiknas. 2001. *Pedoman Pembinaan Pengembangan Koperasi sekolah Siswa SMK*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995. *Tentang Gerakan Nasional Dan Membudayakan Koperasi sekolah*. Jakarta.
- [http://Inpres\\_1995\\_004Kewirausahaan.go.id/pdf](http://Inpres_1995_004Kewirausahaan.go.id/pdf) di akses 20 Agustus 2015
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002. *Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*. Jakarta. <http://kepmen-diknas-004-tahun2002.go.id/pdf> di akses 20 Agustus 2015
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mursidi, Ali. 2010. *Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Tarbiyah IAIN.
- Rohmah, Nailur. 2010. *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Tarbiyah UTN.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim prima pena. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS)*. Jakarta: Cemerlang.
- Zimmerer, Thomas W, Norman M. Scarborough, dkk. 2008. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Koperasi sekolah dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta. Salemba Empat.
- Zunaidi, Arif. 2009. *Peranan Komite Sekolah dalam Pembelajaran PAI di SMP Islam Ngebruk Sumber Pucung Malang pada Manajemen Berbasis Sekolah*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Tarbiyah UTN.

## Daftar Nama SMP di Bandar Lampung Yang memiliki Koperasi dan Tidak

No.	Nama	Alamat	Status	Koperasi	
				Ya	Tidak
1	MTSN 1 TANJUNG KARANG	Jl. Way Kanan No. 42	Negeri	Ya	
2	MTSN 2 TANJUNG KARANG	Jl. Pulau Pisang No. 20	Negeri		Tidak
3	SMPN 01 BANDAR LAMPUNG	JL.MR.GELE HARUN NO.30	Negeri	Ya	
4	SMPN 02 BANDAR LAMPUNG	JL. JEND. SUDIRMAN RAWA LAUT	Negeri	Ya	
5	SMPN 03 BANDAR LAMPUNG	JL. BASUKI RAHMAT GEDONG PAKUON	Negeri	Ya	
6	SMPN 04 BANDAR LAMPUNG	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 93	Negeri	Ya	
7	SMPN 05 BANDAR LAMPUNG	JL. BEO NO. 134 TANJUNG AGUNG	Negeri	Ya	
8	SMPN 06 BANDAR LAMPUNG	JL. LAKSAMANA MALAHAYATI	Negeri	Ya	
9	SMPN 07 BANDAR LAMPUNG	JL. SULTAN BADARUDDIN NO.4 SG. MIDER	Negeri	Ya	
10	SMPN 08 BANDAR LAMPUNG	JL. UNTUNG SUROPATI GG. BUMI MANTI 2	Negeri	Ya	
11	SMPN 09 BANDAR LAMPUNG	JL. AMIR HAMZAH NO. 9 GOTONGROYONG	Negeri	Ya	
12	SMPN 10 BANDAR LAMPUNG	JL. PANGLIMA POLIM NO. 5	Negeri	Ya	
13	SMPN 11 BANDAR LAMPUNG	JL. SENTOT KETAPANG	Negeri	Ya	
14	SMPN 12 BANDAR LAMPUNG	JL. P. MOROTAI	Negeri	Ya	
15	SMPN 13 BANDAR LAMPUNG	JL. MARGA BERINGIN RAYA	Negeri	Ya	
16	SMPN 14 BANDAR LAMPUNG	JL. TEUKU CIK DITIRO LANGKAPURA	Negeri	Ya	
17	SMPN 15 BANDAR LAMPUNG	JL. BANTEN NO. 18 KURIPAN	Negeri	Ya	
18	SMPN 16 BANDAR LAMPUNG	JL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO NO. 42	Negeri		Tidak
19	SMPN 17 BANDAR LAMPUNG	JL. ABDI NEGARA NO. 9	Negeri	Ya	
20	SMPN 18 BANDAR LAMPUNG	JL. RASUNA SAID NO. 29 SUMUR BATU	Negeri	Ya	

21	SMPN 19 BANDAR LAMPUNG	JL. SUKARNO HATTA GG. TURI NO. 1	Negeri	Ya
22	SMPN 20 BANDAR LAMPUNG	JL. RA. BASIT LABUHAN DALAM	Negeri	Ya
23	SMPN 21 BANDAR LAMPUNG	PERUM KORPRI BNLOK D8	Negeri	Ya
24	SMPN 22 BANDAR LAMPUNG	JL. PAGAR ALAM GEDONG MENENG	Negeri	Tidak
25	SMPN 23 BANDAR LAMPUNG	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 76 RAWA LAUT	Negeri	Ya
26	SMPN 24 BANDAR LAMPUNG	JL. LETKOL HI. INDRO SURATMAN	Negeri	Ya
27	SMPN 25 BANDAR LAMPUNG	JL. AMIR HAMZAH NO. 58 GOTONGROYONG	Negeri	Ya
28	SMPN 26 BANDAR LAMPUNG	JL. IMAM BONJOL KURUNGAN NYAWA	Negeri	Ya
29	SMPN 27 BANDAR LAMPUNG	LEMPASING	Negeri	Ya
30	SMPN 28 BANDAR LAMPUNG	PERUMNAS BUKIT KEMILING	Negeri	Ya
31	SMPN 29 BANDAR LAMPUNG	JL. SUKARNO HATTA	Negeri	Tidak
32	SMPN 30 BANDAR LAMPUNG	SERENGSEM	Negeri	Tidak
33	SMPN 31 BANDAR LAMPUNG	JL. RIYAKUDU CAMPANG RAYA TANJ. KRG TIMUR	Negeri	Ya
34	SMPN TERBUKA 11 BANDAR LAMPUNG	JL. SENTOT, KETAPANG TELUKBETUNG SELATAN	Negeri	Ya
35	SMPN TERBUKA 15 BANDAR LAMPUNG	JL. BANTEN NO.18 TELUKBETUNG BARAT	Negeri	Ya
36	SMPN TERBUKA 20 BANDAR LAMPUNG	JL. R.A BASYID	Negeri	Ya

## Foto Kegiatan



